

Implementasi Kebijakan Pendidikan di Sekolah SD Swasta PAB 18 Sampali

Nadhilah Ajrina, Cantika Amalia, Annisa Hananiyah, Firman Hadi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Tujuan riset ini yakni implementasi kebijakan untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat Teralisasi Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat terjun langsung ke lapangan, Data penelitian berupa hasil wawancara dengan implementasi kebijakan pendidikan Kemudian hasil wawancara yang terkumpul dipilih dan di susun dengan rapi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa “implementasi” merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan, Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkutan paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Proses implementasi bersangkutan paut juga dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam implementasi kebijakan terdapat proses yang harus dilaluidi antaranya yaitu strategi dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh, serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi.

Kata kunci: kebijakan, pendidikan, sekolah dasar, Swasta

Pendahulaun

Dalam implementasi kebijakan pendidikan ada beberapa pendekatan salah satunya, yaitu top down dan bottom up pendekatan top down yaitu pendekatan menurunkan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro. Pendekatan ini menjadikan pemerintah berperan besar untuk memberikan kebijakan. Kebijakan yang bersifat top down ini bersifat secara strategis, umum dan berhubungan dengan keselamatan negara, seperti kurikulum pendidikan, pembiayaan pendidikan nasional, pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 dan lain sebagainya. Pendekatan bottom up, yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat). kebijakan ini diawali dari masyarakat melalui aspirasi, permintaan dan dukungan dari masyarakat. implementasi kebijakan berusaha untuk menyampaikan harapannya dan permasalahan yang dihadapi. pendekatan yang berkenaan dengan bottom up biasanya berkenaan dengan hal-hal yang tidak menyangkut masalah keamanan nasional, kebijakan ini berfokus kepada hal-hal seperti alat-alat kontrasepsi, padivarietas unggul, pengembangan ekonomi nelayan dan lain sebagainya yang berfokus pada satu

bidang yang menjadi masalah yang dihadapi

Hal ini tidak lain demi mewujudkan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan di Sekolah SD Swasta PAB 18 Sampali ini. Dalam penelitian sederhana ini mencakup permasalahan pengimplementasian kebijakan pendidikan di Sekolah SD Swasta PAB 18 Sampali. Dan bagaimana upaya kepala sekolah dan strategi guru dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan di sekolah tersebut. Mini riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian kebijakan pendidikan di Sekolah SD Swasta PAB 18 Sampali dan bagaimana dampaknya bagi sekolah tersebut. Penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang masih belum mengetahui bagaimana cara dan pengimplementasian kebijakan pendidikan di suatu sekolah.

Pembahasan

2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Pendidikan merupakan salah satu ujung tombak kemajuan bangsa pada masa depan bangsa. Dalam pengembangan pendidikan Pendidikan

Nasional, maka perlu adanya kebijakan yang menjadikan pendidikan lebih maju. Peran kebijakan sendiri sangat penting, karena bisa membantu seorang membuat keputusan dengan memberikan informasi yang diperoleh melewati proses penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan mengungkap ketidakcocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatif-alternatif baru dan mengusulkan cara-cara menterjemahkan ide-ide kedalam kebijakan-kebijakan yang mudah diwujudkan dan direalisasikan. Dalam pembuatan kebijakan ini tentu adanya implementasi untuk melihat hasil dari kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan-kebijakan dalam pendidikan itu sendiri dengan melihat tahapan-tahapan dan pendekatan implementasi kebijakan pendidikan.

Kebijakan adalah terjemahan dari policy, yang bersumber dari bahasa Inggris. Kata policy dapat juga diartikan sebuah rencana dalam kegiatan yang di dalamnya berisikan tujuan-tujuan yang akan di ajukan serta di beri keputusan oleh pemerintah, partai politik dan yang lainnya. Secara kata etimology kata kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani yang berarti polis yang artinya kota. Kebijakan merupakan sebuah putusan

yang di buat untuk sebuah lembaga atau aparatur negara yang bertanggung jawab baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif kebijakan di buat karena melaksanakan tujuan negara tersebut. Kebijakan disini adalah adanya putusan oleh pemerintah memalui hasil musyawarah dengan beberapa lembaga seperti (eksekutif, legislatif dan yudikatif) agar masyarakat bisa maju karenanya di ambillah kebijakan yang dapat di putuskan dan memberikan jalan kehidupan bermasyarakat dari seluruh secara umum. Kebijakan yang baik ialah yang dapat bermanfaat untuk banyak orang dan tidak merugikan oleh banyak orang karena di dalam kebijakan di buat berdasarkan undang-undang yang jelas adanya. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan bagian proses untuk pembuatan kebijakan, yang ada seperti dinyatakan oleh (Hasbullah, 2015) bahwasanya di dalam proses pembuatan kebijakan yang berlangsung dalam beberapa tahap pembuatan kebijakan politik dimana aktivitas politik yang sedang berlangsung dalam tahapan membuat kebijakan dan di visualkan sebagai serangkaian dari tahap yang saling mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain yang dapat di atur berdasarkan urutan waktu dan seperti penyusunan agenda, formulasi, adoptasi dan implementasi kebijakan pendidikan

mengilustrasikan secara rinci pada fase dan karakter pembuat kebijakan itu dan dimana implementasi adalah bagian yang ada di dalamnya.

Di fase pertama merupakan penyusunan agenda ,karakterfase misalnya beberapa pejabat yang di pilih dan di angkat menempatkan adanya masalah pada publik. Di fase kedua merupakan formulasi kebijakan karakter di fase ini adalah pejabat yang merumuskan kebijakan untuk mengatasi semua masalah, yang di alternatifkan kebijakan dapat melihat ada perlunya membuat perintah eksekutif dan peradilan dan tingkatan legislatif.Di fase ketiga merupakan adopsi kebijakan,karakter misalnya unik pemeriksaan dan akuntansi di dalam pemerintahan yang menentukan badan eksekutif,yudikatif dan legislatif serta peradilan fase yang keempat merupakan dari implementasi kebijakan karakteristik kebijakan yang di laksanakan oleh beberapa unit administrasi pada sumber finansial dan kemanusiaan.Fase yang terakhir merupakan penilaian kebijakan berkarakter di fase ini adanya unit pemeriksaan dan akuntansi di dalam pemerintah dapat menentukan badan eksekutif,yudikatif dan legislatif serta peradilan yang memenuhi persyaratan di dalam undang-undang yang membuat

implementasi kebijakan yang terbagi menjadi tiga tahap perumusan masalah dan tahap formulasi dan adoptasi kebijakan , dengan demikian penemuan ini dapat berkembang secara dinamis dengan adanya berbagai keragaman situasi dan kondisi yang di hadapi yang meliputi dari keagamaan stratifikasi kebijakan,jenis-jenis kebijakan dan lingkungan kebijakan (hassbuallah 2015).

2.2 Tahapan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan sebuah kebijakan bersentuhan dengan stakeholder pendidikan serta dapat di terima oleh masyarakat. implementasi kebijakan merupakan hal yang rumit dengan prosese yang kompleks. Dalam hal ini dapat diketahui bila dalam tahapan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan baik, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan inptimalisasinya,maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu.Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar dalam evaluasi mendapatkan hasil yang sesuai dengan target.Charles O Jones dalam gaffar memiliki tiga tahapan utama,

yakni organization, interpretation, and application.pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdayayang ada, unit-unit serta metode untuk menjalankan program yang sudah direncanakan.kedua, interpretasi, yaitu aktivitas sosialisasi dan pengarah kebijakan agar program yang sudah direncanakan tepat dan dapat diterima serta dijalankan. ketiga, aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program yang nantinya menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut. Dari beberapa ulasan di atas dapat ditarik disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu kebijakandengan tahapan-tahapan yang dilakukan menjadikan kebijakan tersebutmencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Adapun Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi literature. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata yang digunakan sebagai sumber data dan bukan menggunakan angka sebagai objek

penelitiannya. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang terjadi didalam kehidupan oleh subjek penelitian di lapangan. Adapun jenis penelitian ini menggunakan deskriptif analitik dimana peneliti tidak hanya menjelaskan fenomena tertentu, tetapi peneliti turut serta melakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

3.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di SD Swasta PAB 18 Sampali.

2. Sampel

Mengingat populasinya, agar diperoleh sampel yang representative yaitu sampel yang benar-benar menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, maka sampel diambil memakai dengan teknik, yaitu *Purposive Sampling*.

Purposive Sampling yaitu sampling yang bertujuan untuk mengambil subjek

yang di dasarkan atas tujuan tertentu (Arikunto, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya guru dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara semi struktur. Teknik pencatatan wawancara semi struktur dengan menggunakan voice recorder handphone dan wawancara tidak struktur dengan menggunakan catatan kecil. Deskripsi masalah yang peneliti angkat berdasarkan masalah etic yang merupakan *teoritical review* serta *empirical finding* yang permasalahannya muncul dari temuan teori atau penelitian sebelumnya (Milla, 2011). Peneliti mencari sumber literatur mengenai bahasa dan penyalahgunaannya pada orang masa kini sehingga muncul masalah yang menarik perhatian peneliti tentang penggunaan bahasa indonesia dengan baik dan benar dan perkembangannya pada masa kini. Kemudian peneliti memilih responden dan menjalin komunikasi dan pendekatan hingga responden mau menjadi subjek dalam penelitian ini. Lalu peneliti melakukan wawancara semi struktur secara mendalam selama 1 kali.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang dilakukan sesuai dengan pendekatan fenomenologi, sehingga analisis data yang digunakan dengan cara mengeksplorasi pengalaman-pengalaman subjektif dan mengklarifikasi situasi yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Dari pertanyaan wawancara kemudian di analisis setiap jawaban responden dan mengidentifikasinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

1. Bagaimana Proses implementasi kebijakan pendidikan di SD Swasta PAB 18 sampai ini?

Setelah di keluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan outcome bagi masyarakat.

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tersangkut paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program.

Implementasi artinya pelaksanaan/penerapan biasanya dikaitkan dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Proses implementasi bersangkutan paut juga dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program dalam implementasi juga terdapat proses yang harus dilalui diantaranya yaitu: strategi dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi.

Hal ini tidak lain demi mewujudkan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan.

2. Bagaimana sekolah menyikapi kebijakan yg lahir dari pemerintah/kedinasan terkait yang mewajibkan aturan tertentu ?

Dalam mengeluarkan kebijakan tersebut Pemerintah tentu sudah memikirkan & memutuskan program yang terbaik yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan mendapatkan generasi yang semakin meningkat kualitasnya. Oleh karenanya sekolah sebagai pelaksanaannya tentu harus mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Program pemerintah dapat tercapai dengan maksimal. Selama kebijakan tersebut tidak menyimpang maka sebagai Warga Negara yang baik kita harus melaksanakan dengan sebaik baiknya sesuai kemampuan.

3. Sebagai kepala sekolah, bagaimana menyikapi hal yang memungkinkan bisa terjadi seperti pelanggaran oleh oknum warga

sekolah terhadap aturan yang lahir dari kebijakan kepala sekolah?

Untuk kemungkinan pelanggaran oleh warga sekolah pasti ada, tentu ada alasan mereka melakukan pelanggaran tersebut. Nah untuk meminimalisirkan pelanggaran, saya membuat reward.

4. Bagaimana peran guru serta kepala sekolah dalam peningkatan mutu sekolah SD Sampali PAB 18?

Tentu saja sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun kepala sekolah. Guru menjadi fasilitator, motivator serta arahan kepada siswa. Kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin di sekolah dan bertanggung jawab dan memimpin proses pendidikan di sekolahnya yang berkaitan dengan SDM, peningkatan profesionalisme guru, karyawan, dan semua yang berhubungan dengan sekolah dibawah naungan kepala sekolah.

5. Bagaimana cara seorang kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam wewenangnya?

Untuk meningkatkan kompetensi guru diawal penerapan implementasi kurikulum merdeka, dikarenakan ini adalah peralihan dari k13-Ikm yang pertama sekolah mengikutkan guru untuk diklat dari dinas pendidikan, kemudian dilanjut dengan workshop dengan mengundang narasumber dibidangnya. Kemudian ada juga banyak belajar dari platform merdeka mengajar (PMM), dari PMM tersebut. Guru harus mempelajari, kemudian membuat dan mengunggah aksi nyata di PMM tersebut, maka guru akan mendapat sertifikat nasional.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan pendidikan adalah proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dan diadopsi. Proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan beberapa tahapan, strategi, dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh, serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi.

Tujuan dari implementasi kebijakan pendidikan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan dan memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam implementasi kebijakan pendidikan, terdapat beberapa pendekatan, salah satunya adalah pendekatan top down yang menurunkan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau makro.

Oleh karenanya sekolah **SD Swasta PAB 18 Sampali** sebagai pelaksanaannya di tingkat unit

mendukung kebijakan pemerintah tersebut . Program pemerintah dapat tercapai dengan maksimal. Selama kebijakan tersebut tidak menyimpang maka pihak sekolah harus melaksanakan dengan sebaik baiknya sesuai kemampuan, dan hal itu sudah mulai perlahan dilaksanakan. Selain itu untuk kemungkinan pelanggaran dari kebijakan pendidikan oleh warga sekolah pasti ada. Uniknya di Sekolah tersebut mengutamakan reward bagi warga sekolah yang patuh dengan kebijakan pendidikan.

Referensi

- Wahyulestari, M. R. D. (2018, July). Ketrampilan Dasar Mengajar di Sekolah Dasar. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* (Vol. 1, No. 1).
- Teguh, M. (2020). Gerakan literasi sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 1(2), 1-9.
- Minsih, M., Rusnilawati, R., & Mujahid, I. (2019). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Membangun Sekolah Berkualitas Di Sekolah Dasar. *Profesi Pendidikan Dasar*, 6(1), 29-40.